

## Kajian Determinasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Provinsi Muda di Indonesia

Agussalim<sup>1</sup>, Bakhtiar Mustari<sup>2</sup>, Malharita Rahmatia Haliku<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Indonesia,  
[agusjerox@gmail.com](mailto:agusjerox@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Indonesia,  
[tiarmustari@gmail.com](mailto:tiarmustari@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Indonesia,  
[malharitarahmatia@gmail.com](mailto:malharitarahmatia@gmail.com)

E-mail Korespondensi: [malharitarahmatia@gmail.com](mailto:malharitarahmatia@gmail.com)

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan ke Belanja Modal Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan program Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of Local Revenue and Balancing Funds on Capital Expenditure in Gorontalo Province. This study uses a quantitative approach. The data used are secondary data. Data collection in this study was obtained through literature studies. The method used is multiple linear regression analysis using the Eviews 12 program. The results of this study indicate that Revenue Sharing Funds have no effect on Capital Expenditure, while Local Revenue, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds have a negative and significant effect on Capital Expenditure.*

*Keywords: Local Revenue, Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Capital Expenditure.*

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tertuang bahwa penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada setiap daerah untuk menghimpun dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerah dengan potensi ekonomi, sosial budaya, dan politik serta kapasitas keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang pada awalnya didominasi oleh Pemerintah pusat (sentralisasi) kemudian berubah dengan memberikan keleluasaan yang lebih pada Pemerintah daerah dalam bertanggung jawab menjalankan otonominya sendiri terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan daerahnya atau dikenal dengan sebutan desentralisasi. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah menimbulkan suatu tanggung jawab yang lebih besar pada Pemerintah daerah dibandingkan pada saat era sentralisasi. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, harus ada suatu kebijakan yang tepat berasal dari Pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi-potensi daerah untuk menjadi sumber keuangan. Sumber keuangan yang dimaksud memiliki banyak jenis termasuk yang berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan memiliki peran penting dalam menentukan belanja modal daerah. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan pelayanan publik, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Razak et al., 2023).

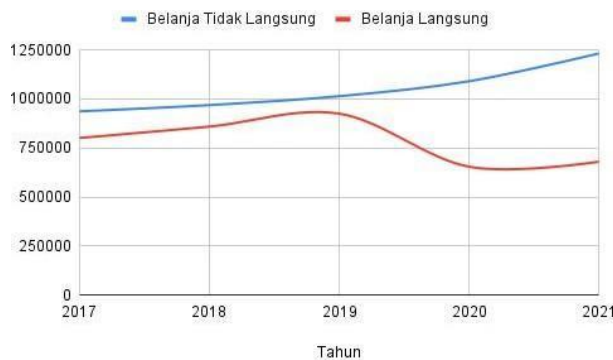


Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah

**Grafik 1.1 Realisasi Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021**

Dalam gambar 1.1 data resmi yang berasal dari BPS Provinsi Gorontalo tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa realisasi PAD dan Dana Perimbangan Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2020 dan 2021, PAD Provinsi Gorontalo justru mengalami penurunan dengan dipengaruhi beberapa faktor termasuk salah satunya adalah kebijakan Pemerintah dalam upaya penanggulangan selama masa pandemi virus Covid-19 untuk menekan jumlah penyebaran yaitu pelaksanaan PPKM. Pada rentang tahun 2017-2019, dapat dilihat bahwa walaupun PAD mengalami kenaikan pemerintah pusat akan tetap mendukung dan menyokong kebutuhan daerah dengan cara adanya penyaluran dana perimbangan. Pemerintah daerah tidak boleh terus menerus bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dalam hal pembiayaan kegiatan desentralisasinya.

Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal. Kartika dan Dwirandra (2014) menjelaskan bahwa produktivitas masyarakat akan meningkat, jika daerah mempunyai layanan publik yang memadai yang bersumber dari PAD. Pembangunan ekonomi akan terwujud ketika infrastruktur serta sarana prasarana terpenuhi yang digunakan dalam kegiatan perekonomian daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah

**Grafik 1.2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo 2017-2021**

Belanja tidak langsung adalah jenis belanja daerah yang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan belanja langsung. Grafik belanja langsung terlihat mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir. Peneliti menyimpulkan bahwa adanya kaitan erat antara hal ini dengan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Data yang telah disajikan diatas menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo memang lebih fokus pada belanja tidak langsung daripada belanja langsung. Pada belanja langsung kita ketahui bersama terdapat didalamnya jenis belanja daerah yang berhubungan erat dengan infrastruktur yaitu belanja modal. Seharusnya, meskipun tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur berapa besaran pengalokasian PAD dan dana perimbangan khusus untuk belanja modal, akan tetapi perlu juga mempertimbangkan peran infrastruktur sebagai salah satu penyokong berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dalam berbagai aspek terutama dalam perekonomian lalu akan berujung pada mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan berdampak pula pada pendapatan daerah. Jaya (1999) menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Gorontalo? Kemudian tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melihat bagaimana Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Gorontalo.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Keuangan Negara dan Daerah**

Pemerataan pembangunan di daerah tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan keuangan negara. Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan daerah. Keuangan daerah berperan dalam mendukung otonomi daerah yang efektif, dengan memberikan kemampuan kepada daerah untuk mengelola sumber daya mereka sendiri dan merespons kebutuhan masyarakat setempat (Karim et al., 2021). Pemerintah intervensi untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya melalui kebijakan fiskal yang mencakup pengeluaran pemerintah untuk program-program bantuan (Anwar et al., 2022).

Ruang lingkup yang diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikategorikan dalam beberapa sub bidang, yaitu:

#### 1. Pengelolaan Moneter

Dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

#### 2. Pengelolaan Fiskal

Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepebeaan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan Pemerintah berkaitan dengan APBN.

#### 3. Pengelolaan Kekayaan Negara

Dikhususkan untuk proses pengadaan barang kekayaan negara, termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lalu terdapat pula kekayaan negara/daerah yang dipisahkan yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik daerah (BUMD).

### **Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pengembangan infrastruktur desa dapat memperkuat daya tahan lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat (Darmi et al., 2023).

### **Teori Kebijakan Fiskal**

Dalam teori ekonomi mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai aktivitas Pemerintah terkait upaya (mengumpulkan) penerimaan negara dan membelanjakannya (Mankiw, 2013). Wahyudi et al. (2022) menyatakan kebijakan fiskal yang efektif mencakup integrasi antara perencanaan pusat dan daerah, yang mempengaruhi alokasi sumber daya dan pengeluaran untuk sektor-sektor strategis. Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang tujuannya mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik dengan mengambil jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran Pemerintah. Menurut Sudirman (2017) kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disingkat APBD untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat Pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Wahyudi et al. (2022) menyatakan kebijakan fiskal yang efektif mencakup integrasi antara perencanaan pusat dan daerah, yang mempengaruhi alokasi sumber daya dan pengeluaran untuk sektor-sektor strategis. Ghifara et al. (2022) menyatakan bahwa jumlah besar pengeluaran pemerintah, terutama pengeluaran pemerintah yang

dikeluarkan untuk setiap daerah, mencerminkan peran pemerintah dalam intervensi untuk mendorong kegiatan pembangunan

### **Konsep Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 1 angka 6 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka unsur Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Sejak implementasi otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kepentingan publik di masing-masing wilayah (Nursini & Tawakkal, 2019). Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah lokal untuk mengelola sumber daya dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Seniwati et al., 2024).

Pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur dan mengurus sendiri tentang urusan yang ada di masyarakat daerah masing-masing sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah lokal untuk mengelola sumber daya dan merencanakan program pertanian yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Mangilep, 2018).

### **Konsep Pendapatan Asli Daerah**

Dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan daerah, pendapatan merupakan bagian yang sangat penting. Pendapatan adalah sumber keuangan dalam pelaksanaan Pemerintahan dan merupakan gambaran potensi ekonomi daerah. (Sinurat:2018). Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halim (2001 : 67) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dan optimalisasi dana perimbangan dapat berkontribusi pada peningkatan belanja modal, yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Alfons et al., 2024).

## **Konsep Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan alokasi sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah (Iswandi et al., 2020). Adapun jenis-jenis dana perimbangan yaitu sebagai berikut

### **A. Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Sidik, 2004). Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Adanya DBH diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah, sehingga daerah dapat merasakan manfaat dari pendapatan yang telah dipungut dari wilayahnya serta menambah kapasitas fiskal daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan dalam Undang- Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, DBH adalah bagian dari Transfer ke daerah atau TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

### **B. Dana Alokasi Umum**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan Pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari Pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD di daerah otonom. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU)



merupakan bentuk alokasi dari pendapatan APBN yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan desentralisasi. Setiap tahunnya, besaran DAU sekurang-kurangnya ditetapkan sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat tidak melepas sepenuhnya tanggung jawab keuangan kepada Pemerintah daerah, terutama untuk membantu daerah yang kemandirian fiskalnya masih sangat rendah. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan dan layanan publik antar-daerah.

### C. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang diutamakan dalam alokasi DAK meliputi pembangunan, pengadaan, peningkatan, atau perbaikan pada sarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang umur ekonomisnya panjang, termasuk di dalamnya sarana fisik penunjang. DAK dapat digambarkan sebagai suntikan dana yang hanya diberikan kepada daerah yang memenuhi unsur- unsur kriterianya, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan urusan/kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

#### **Belanja Daerah**

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur jalan sebagai contoh salah satu pendukung gerak laju dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur menurut Stone dalam Surya (2009) didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi Pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Belanja modal yang efektif, yang didanai oleh PAD dan dana perimbangan, dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik dalam suatu daerah (Saidy et al., 2024). Belanja daerah yang terfokus pada pengembangan sektor usaha kecil akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan (Anwar & Mangilep, 2019).

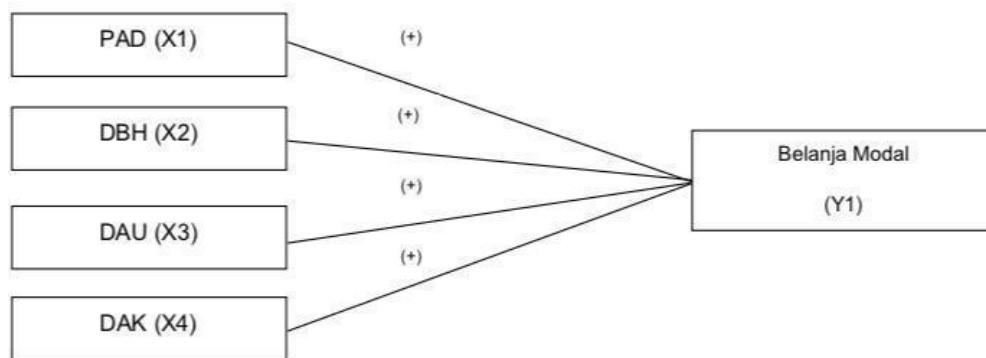
Tinjauan empiris dalam penelitian ini menggunakan

A. Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018 oleh Anak Agung Gede Mantra Suarjana dan Nyoman Indah Kusuma Dewi. Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali, menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali, dan menganalisis pengaruh PAD dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi berganda. Hasil analisis data dengan signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa: PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Korelasi dan kontribusi antara PAD dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur adalah sebesar 0,969 dengan kontribusi sebesar 92,8%.

B. Pengaruh Pendapatan Asli daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar tahun 2019 oleh Sulfadli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama 5 tahun (2008- 2012). Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Balancing Dana (DP) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perekonomian pertumbuhan di Kota Makassar.

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut :



Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1 :Diduga Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Gorontalo.

H2 :Diduga Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi

Gorontalo. H3 :Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Gorontalo.

H4 :Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pdi Provinsi Gorontalo.

### **METODOLOGI KAJIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo

Untuk keperluan analisis, maka dalam penelitian digunakan data sekunder. Sumber data yang berbentuk time series ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan artikel resmi Pemerintah. Data yang diambil untuk penelitian ini yaitu data angka realisasi Pendapatan Asli daerah, data Dana Bagi Hasil, data Dana Alokasi Umum, data Dana Alokasi Khusus, data Belanja Modal.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dengan menggunakan metode analisa regresi linear berganda dalam penelitian ini, akan dilihat pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel variabel terikat. Model regresi berganda akan membahas tentang model regresi yang terdiri dari lebih dari satu variabel independen. (Widarjono, 2017). Adapun persamaan umum regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel bebas, maka bentuk persamaan regresinya adalah sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (1)$$

Dimana :

Y	= Belanja Modal
a	= Intercept
b	= Koefisien regresi
X1	= Pendapatan Asli daerah
X2	= Dana Bagi Hasil
X3	= Dana Alokasi Umum
X4	= Dana Alokasi Khusus
e	= Standar error

## Definisi Operasional

Variabel merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan seseorang dalam sebuah penelitian. Variabel mencakup segala sesuatu yang ditetapkan dalam mendapatkan informasi mengenai beberapa hal. Secara umum, variabel merupakan sesuatu yang beragam sehingga sifatnya dapat berubah-ubah dan sebagainya. Berdasarkan sifat variabel dapat dibedakan menjadi lima, yaitu sifat variabel, hubungan antar variabel, urgensi pembukaan instrumen dan tipe skala pengukuran.

Variabel dibedakan menjadi variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Jenis variabel bebas ini menjadi penyebab terjadinya perubahan pada setiap variabel lain, bisa dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan perubahan pada variabel lain. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya diakibatkan karena adanya variabel bebas. Sehingga disebut variabel terikat, karena kondisi atau variasinya terkait dan dipengaruhi oleh variabel lain.

1. Pendapatan Asli daerah (X1) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam satuan rupiah periode 2002-2021.
2. Dana Bagi Hasil (X2) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam satuan rupiah periode 2002-2021.
3. Dana Alokasi Umum (X3) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam satuan rupiah periode 2002-2021.
4. Dana Alokasi Khusus (X4) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu dalam satuan rupiah periode 2002- 2021.
5. Belanja Modal (Y) adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dalam satuan rupiah periode 2002- 2021.

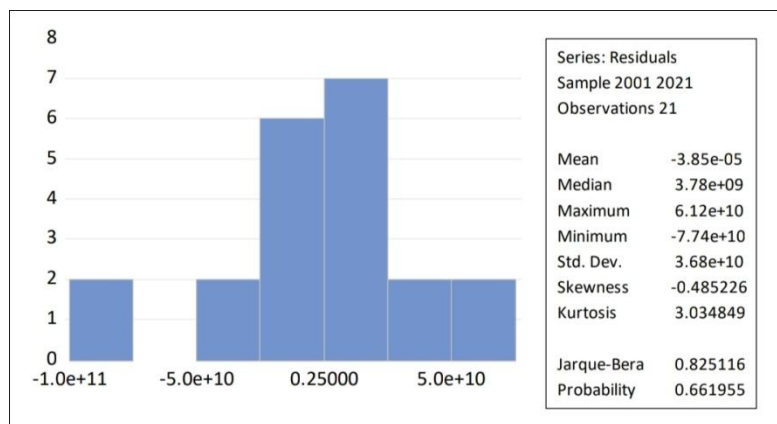
## HASIL KAJIAN DAN DISKUSI

Analisis regresi bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam pengujian regresi ini menggunakan model regresi linear berganda. Adapun hasil estimasinya yaitu dengan menggunakan Eviews 12 diperoleh dari hasil regresi sebagai berikut:

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan Jarque- Bera. Maka hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



0.661955, dimana nilai tersebut lebih besar dari pada nilai alpha yaitu 5% atau 0.05, sehingga data pada penelitian ini berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors  
 Date: 12/16/22 Time: 20:02  
 Sample: 2001 2021  
 Included observations: 21

Variable	Coefficien t	Uncentered VIF	Centered VIF
	Variance		

C	9.90E+20	11.24685	NA
PAD	0.158042	103.3535	36.45389
DBH	5.257551	23.38543	3.104445
DAU	0.037873	180.3644	42.72496
DAK	0.012653	7.559284	3.838445

Berdasarkan uji output multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum masing-masing adalah sebesar 36.45 dan 42.72 artinya variabel Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum berada di taraf multikoloniaritas tinggi atau memiliki nilai  $VIF > 10$ , sedangkan variabel Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus memiliki nilai  $VIF < 10$ . Artinya terdapat dua variabel yang mengalami gejala multikoloniaritas sedangkan dua lainnya tidak mengalami gejala multikoloniaritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis:

Homoskedasticity

F-statistic	3.245485	Prob. F(4,16)	0.0395
Obs*R-squared	9.406573	Prob. Chi-Square(4)	0.0517
Scaled explained SS	8.676771	Prob. Chi-Square(4)	0.0697

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-Square (4) pada Obs\*R-squared sebesar 0.06, dimana nilai tersebut diatas 0.05 sehingga data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.063538	Prob. F(2,14)	0.9387
Obs*R-squared	0.188900	Prob. Chi-Square(2)	0.9099

Data hasil regresi diatas menunjukkan bahwa hasil *probabilitas chi-square (2)*

adalah 0.9099 atau  $>0,05$  sehingga data regresi pada penelitian ini tidak mengandung autokorelasi.

### Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable:  
BM Method: Least  
Squares Date:  
12/16/22 Time:  
14:44 Sample: 2001  
2021  
Included observations: 21

:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.26E+10	3.01E+10	1.081432	0.2955
PAD	-0.892348	0.380381	-2.345932	
DBH	-4.642330	2.193941	-2.115978	
DAU	0.784152	0.186207	4.211191	0.0007
DAK	-0.244794	0.107627	-2.274457	

---

R-squared	0.820309	1.79E+11
Adjusted R-squared	0.775386	8.68E+10
Sum squared resid	2.71E+22	51.9225
Log likelihood	-540.1870	52.1712
F-statistic		7
Mean dependent var		51.9765
S.D. dependent var		
Akaike info criterion		
Schwarz criterion		
Hannan		

---

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 4.6 maka persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 3.26E+10 + -0.892348X1 + 4.642330X2 + 0.784152X3 + -0.244794X4 + e$$

Persamaan diatas menjelaskan bahwa variabel Pendapatan Asli daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus memiliki hubungan yang negatif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki hubungan yang positif terhadap Belanja Modal. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Nilai koefisien variabel X1 (Pendapatan Asli daerah) berada pada nilai negatif sebesar -0.892348 yang berarti apabila Pendapatan Asli daerah mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel bebas lainnya bernilai tetap/konstan, maka akan mengalami penurunan Belanja Modal sebesar 0.892348%.
- b. Nilai koefisien variabel X2 (Dana Bagi Hasil) berada pada nilai negatif sebesar -



4.642330 yang berarti apabila Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel bebas lainnya bernilai tetap/konstan, maka akan mengalami penurunan Belanja Modal sebesar 4.642330%.

c. Nilai koefisien variabel X3 (Dana Alokasi Umum) berada pada nilai positif sebesar 0.784152 yang berarti apabila Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel bebas lainnya bernilai tetap/konstan, maka akan mengalami kenaikan Belanja Modal sebesar 0.784152%.

d. Nilai koefisien variabel X4 (Dana Alokasi Khusus) berada pada nilai negatif sebesar - 0.244794 yang berarti apabila Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan sebesar

1% dan variabel bebas lainnya bernilai tetap/konstan, maka akan mengalami penurunan Belanja Modal sebesar 0.244794%

a. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen untuk menerangkan variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dilakukan dengan menggunakan Adjusted R-Squared pada persamaan regresi. Adjusted R-Squared mencerminkan seberapa besar perubahan variabel dependen yang dapat ditentukan oleh perubahan variabel-variabel independen. Nilai koefisien determinasi semakin tinggi (mendekati satu) berarti semakin kuat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum (X3), Dana Alokasi Khusus (X4) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Gorontalo diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0.775386 hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu Be dijelaskan oleh variabel bebas 77.53% kemudian sisanya (100% - 77.53% = 22.47%) dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model.

Uji t

1. Nilai probabilitas t-hitung variabel Pendapatan Asli daerah (X1) sebesar 0.0322 < nilai probabilitas  $\alpha=0,05$  sehingga dapat dikatakan H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak yang artinya bahwa variabel Pendapatan Asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

(Y) di Provinsi Gorontalo.

2. Nilai probabilitas t-hitung variabel Dana Bagi Hasil (X2) sebesar  $0.0504 >$  nilai probabilitas  $\alpha=0,05$  sehingga dapat dikatakan  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang artinya bahwa variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Gorontalo.
3. Nilai probabilitas t-hitung variabel Dana Alokasi umum (X3) sebesar  $0.0007 <$  nilai probabilitas  $\alpha=0,05$  sehingga dapat dikatakan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Gorontalo.
4. Nilai probabilitas t-hitung variabel Dana Bagi Hasil (X2) sebesar  $0.0371 >$  nilai probabilitas  $\alpha=0,05$  sehingga dapat dikatakan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Gorontalo.

#### Uji F

Uji F merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel secara bersama-sama yaitu variabel Pendapatan Asli daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum (X3), dan Dana Alokasi Khusus (X4) terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y). Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F-statistik adalah 18.26044 sedangkan nilai probabilitasnya adalah 0.000008 dengan tingkat alpha ( $\alpha$ ) 5%. Dengan nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari alpha ( $\alpha$ ) 5%. Maka dapat diartikan bahwa variabel Pendapatan Asli daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal Provinsi Gorontalo. Hal ini mengakibatkan Pendapatan Asli daerah belum mampu untuk memberikan kontribusi terhadap belanja modal, karena persentasenya masih sangat kecil untuk digunakan dalam membiayai belanja modal dikarenakan terdapat adanya kebutuhan atau belanja lain yang

menggunakan Pendapatan

Asli daerah sebagai sumber pendanaannya dalam kegiatan desentralisasi.

2. Dana Bagi Hasil yang merupakan salah satu dari komponen pendapatan daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal yang mana hal ini menunjukkan bahwa DBH Provinsi Gorontalo dialokasikan untuk membiayai belanja lain, bukan hanya belanja modal.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Gorontalo. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dimana DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk fokus pada tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan pembiayaan untuk penyediaan layanan publik daerah.
4. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Gorontalo. Dana Alokasi Khusus belum dapat diandalkan untuk menutupi keperluan belanja modal yang seharusnya menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

### **Saran**

1. Pemerintah dapat meningkatkan usaha untuk menggali potensi daerah agar pendapatan asli daerah dapat menjadi penyokong dalam kegiatan desentralisasi dan jalannya roda perputaran kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang.
2. Pemerintah dapat mendukung adanya perkembangan dan melakukan pengawasan terhadap realisasi belanja daerahnya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai variabel-variabel lain diluar penelitian lain.

### **REFERENSI**

- [1] Ady, M. M. A. (2015). Socioeconomic Problems on Adoption of New Technologies for Production of Paddy Rice by Farmers in Upland Areas of South Sulawesi. *千葉大学人文社会科学研究*, 30, 150-157.
- [2] Alfons, M. E., & Abd Rahman, R. (2024). *Government Expenditure, Human Development Index and Regional Inequality in Indonesia*. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 4810-4820.
- [3] Anwar, A. I., Firianti, R., & Mangilep, M. A. A. Analysis of Financial Inclusion and Its

Impact on Poverty in South Sulawesi Province, Indonesia.

- [4] Anwar, A. I., Nurlita, A., & Fil'ardy, Y. A. K. (2020, March). Impact of credit on agriculture and industrial processing. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 473, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.
- [5] Anwar, A. I., & Mangilep, M. A. A. (2019, August). The Effects of Economic Growth, Micro Finance Institution, and Micro and Small Enterprises to Income Inequality in South Sulawesi. In *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018)* (pp. 543-546). Atlantis Press.
- [6] Darmi, T., Rosyadi, S., Santosa, P. I., & Mujtahid, I. M. (2023, December). *Analysis of Village Government Institutional Capacity in Strengthening Environmental Resilience. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1268, No. 1, p. 012033). IOP Publishing.
- [7] Falianty, T. A. (2019). *Teori Ekonomi Makro dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- [8] Iswandi, S., & Yunus, R. (2020, March). The implementation of law number 6 the year 2014 concerning with villages in gender-responsive development planning in Uluere District, Bantaeng Regency. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 473, No. 1, p. 012091). IOP Publishing.
- [9] Karim, K., Tajibu, M. J., Fitrianti, R., Reviane, I. T. A., & Nurbayani, S. U. (2021). Consumer behavior in using prepaid electricity systems in the covid-19 pandemic period in Makassar City, Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(5), 172-177.
- [10] Lativa, S (2019). *Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian*. Jurnal Ekonomi, Volume 23
- [11] Mankiw, N. Gregory. (2013). *Teori Makroekonomi. Edisi Kedelapan. Terjemahan*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- [12] Musgrave, 1980, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta.
- [13] Musloqiem (2017). *Hukum Keuangan Negara*. Buku Litera.
- [14] NSS, R. L., Suryawardana, E., & Triyani, D. (2015). Analisis Dampak Pembangunan infrastruktur Jalan Terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 82.

- [15] Nursini, N. (2019). Poverty alleviation in the context of fiscal decentralization in Indonesia. *Economics & Sociology*, 12(1), 270-368.
- [16] Razak, A. R., Fernandes, A. A. R., & Saifullah, N. I. (2023). Moderation of village funds and mediation of agricultural sector growth on poverty in rural areas. *International Journal of Economics and Business Research*, 26(4), 463-483.
- [17] SAIDY, E. N., Muhammad, A. M. R. I., FATTAH, S., & NURBAYANI, S. U. (2024). Determinants of Bank Credit Distribution in Supporting Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. *Journal of Distribution Science*, 22(8), 17-27.
- [18] Seniwati, Amri, K., Mangilep, M.A.A., Tahir, Z., & Ranti, M.A (2024). Handling security and terrorism issues in developing the tourism sector through ecotourism policies on small islands in Makassar City, Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(14), 8234.
- [19] Sudirman, I. (2014). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Kencana.
- [20] Sinaga, Murbanto (2018). *Keuangan Negara*, STIE Bina Karya. Medan
- [21] Tjandra, R. (2006). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- [22] Wahyudi, Fahmid, I. M., Salman, D., & Suhab, S. (2022). Consistency of Central and Regional Planning in the Agricultural Sectors and the Factors Affecting It in Indonesia. *Sustainability*, 14(23), 16297.
- [23] Yusuf, M. H. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal Pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur)*, Vol. 5, No. 2. 2015.